REKRUTMEN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

Oleh: Imelda Purnama Dinda Hamzen

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini merujuk pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun demikian, dalam praktiknya, kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan masih perlu ditingkatkan. Hal ini terbukti di Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru, yang meskipun memiliki banyak kader perempuan, hanya ada satu keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2024, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi, dan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *model of recruitment* karya Pippa Norris serta faktor internal dan eksternal karya Drude Dahlerup, untuk menganalisis keterwakilan perempuan Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kota Pekanbaru tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, melalui analisis *model of recruitment* dilaksanakan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, dengan mempertimbangkan faktor internal, Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melakukan pendidikan politik dan temu kader. Namun, beberapa kegiatan politik yang dilakukan cenderung bersifat umum dan belum cukup fokus pada peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru. Faktor eksternal juga menunjukkan bahwa bacaleg mengalami rintangan dan tantangan, terutama dalam hal pembentukan tim sukses. Hal ini menjadi tantangan bagi Partai Gerindra untuk mengukur potensi elektoral kandidat perempuan yang belum optimal dalam menunjukkan inisiatif dan kemampuan untuk membangun dukungan eksternal dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Keterwakilan Perempuan, dan Pemilihan Umum.

ABSTRACT

This research refers to Law Number 2 of 2011 on Political Parties and Law Number 7 of 2017 on General Elections for the People's Representative Council (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional People's Representative Council (DPRD).

However, in practice, the political rights equality between men and women still needs to be improved. This is evident in the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) in Pekanbaru, which, despite having many female cadres, has only one female representative in the Pekanbaru City DPRD in 2024, who comes from the Gerindra Party faction.

This research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation studies, and literature reviews. The data analysis technique used is descriptive analysis. This study uses the theory of the model of recruitment by Pippa Norris and internal and external factors by Drude Dahlerup, to analyze the representation of women in the Great Indonesia Movement Party in the Pekanbaru City DPRD in 2024.

The results of the study indicate that, through the analysis of the recruitment model, it is implemented openly and democratically in accordance with the applicable legal system. In addition, by considering internal factors, the Great Indonesia Movement Political Party (Gerindra) has conducted political education and cadre meetings. However, some political activities carried out tend to be general in nature and have not focused enough on increasing women's representation in the Pekanbaru City DPRD. External factors also show that prospective legislative candidates experience obstacles and challenges, especially in terms of forming a successful team. This is a challenge for the Gerindra Party to measure the electoral potential of female candidates who are not yet optimal in showing initiative and ability to build external support in fulfilling women's representation in the Pekanbaru City DPRD.

Keywords : *Political Recruitment, Women's Representation, and General Elections.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara demokratis menjamin kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Seluruh warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Prinsip kesetaraan ini menegaskan pentingnya perlakuan hukum yang adil, termasuk dalam menjamin partisipasi politik yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender dalam sistem demokrasi.

Sistem pemilu di Indonesia secara khusus mengatur keterwakilan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka di parlemen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan tentang berbagai tahapan pemilu, termasuk pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa. Pasal 170– 177

mengatur mekanisme verifikasi partai politik oleh KPU sebagai peserta pemilu, guna menjamin proses yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi perempuan dalam politik adalah elemen penting bagi demokrasi yang inklusif. Menurut Pippa Norris (dalam Nurhaidah, 2025), partisipasi politik mencakup kegiatan formal seperti pemilu dan keanggotaan partai, serta aktivitas non-tradisional seperti demonstrasi. Keterlibatan perempuan tidak hanya sebatas pencalonan, tetapi juga mencakup aksi kolektif dalam berbagai bentuk pergerakan politik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, keterwakilan perempuan di politik masih rendah. Pada periode 2019–2024, hanya 20,5% atau 118 dari 575 anggota DPR RI adalah perempuan, dan angkanya lebih kecil di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih

efektif dan perubahan struktural agar perempuan memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan politik.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, termasuk di tingkat lokal seperti DPRD Kota Pekanbaru. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, Gerindra dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama dalam proses rekrutmen calon legislatif yang sesuai dengan visi partai dan preferensi pemilih.

Pada Pemilu Legislatif 2024, Partai Gerindra meraih 20.071.708 suara dan menempati posisi tiga besar secara nasional. Capaian ini mencerminkan besarnya dukungan publik dan memperkuat posisi Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Strategi kampanye yang terarah dan pengelolaan dukungan di setiap daerah pemilihan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut.

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah wilayah untuk pemilihan anggota DPR/DPRD yang membagi Kota Pekanbaru menjadi 7 dapil dengan total populasi 1.085.276 jiwa pada tahun 2024. Kota Pekanbaru diberikan 50 kursi DPRD, dengan alokasi kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing dapil, sehingga dapil dengan populasi lebih besar mendapatkan lebih banyak kursi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan perwakilan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memiliki peran penting dalam pemilihan legislatif di Kota Pekanbaru, dengan anggota legislatif yang mewakili berbagai dapil.

Berdasarkan data Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mencalonkan 19 perempuan atau 39,58% dari total calon tetap, melebihi batas minimal 30% untuk keterwakilan perempuan. Namun, hasil pemilihan menunjukkan hanya satu perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun partai sudah memenuhi persyaratan, keterwakilan perempuan dalam hasil pemilihan masih terbatas. Faktor-faktor seperti dukungan pemilih, strategi kampanye, dan komposisi pemilih di tiap daerah pemilihan mempengaruhi hasil tersebut. Keberhasilan kandidat perempuan tidak hanya bergantung pada jumlah pencalonan, tetapi juga pada efektivitas kampanye yang dijalankan serta respons pemilih terhadap kehadiran perempuan dalam politik.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah melakukan pemetaan politik dengan survei dan riset untuk memahami demografi pemilih di setiap daerah pemilihan. Hal ini bertujuan agar Bacaleg perempuan dapat bersaing efektif di DPRD Kota Pekanbaru dan menciptakan representasi yang seimbang. Pada 2024, terdapat 59 pengurus di tingkat kecamatan, dengan 22 perempuan (37,29%) tersebar di 15 kecamatan. Keterwakilan perempuan ini memenuhi regulasi 30% dan relatif merata di hampir semua kecamatan.

Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat wacana kesetaraan gender. Partai Gerindra telah memiliki organisasi sayap yaitu, PIRA (Perempuan Indonesia Raya) untuk menjawab tantangan kesenjangan gender. Dengan memperkuat peran perempuan, partai ini dapat mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan

serta keadilan yang lebih merata. Melalui jaringan komunitas dan dukungan PIRA, Bacaleg perempuan Gerindra dapat mengumpulkan informasi penting untuk menyusun isu-isu krusial dalam kampanye. 1. Meskipun kebijakan afirmatif mengatur minimal 30% keterwakilan perempuan dalam calon legislatif, banyak tantangan yang menghalangi perempuan untuk 2. mendapatkan kursi di DPRD. Partai seperti Gerindra, yang telah mencatatkan angka keterwakilan perempuan lebih tinggi dari ketentuan minimal, menghadapi kenyataan bahwa hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan perolehan tersebut. Dinamika pemilih juga berperan penting dalam hasil akhir pemilihan.

Dalam upaya memenuhi syarat pencalonan perempuan dalam pemilu, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menerapkan rekrutmen yang mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru. Kebijakan ini menjadi latar belakang penelitian yang berjudul "Rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dalam Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2024".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru tahun 2024 ?
2. Apa saja faktor yang mendorong keterwakilan perempuan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD Kota Pekanbaru pada pemilu tahun 2024 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pola rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru tahun 2024.
2. Mengetahui faktor – faktor yang mendorong keterwakilan perempuan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2024.

D. TINJAUAN TEORI

A. Rekrutmen Politik Rekrutmen politik merupakan proses seleksi individu oleh partai politik untuk memilih kader atau calon legislatif yang kompeten, dan berperan penting dalam menentukan arah serta tujuan partai dalam sistem politik. Dalam karya Pippa Norris (1995) yang berjudul *Political Recruitment : Gender, Race and Class in the British Parliament* membagi proses rekrutmen menjadi tiga tahapan, yaitu *Legal System* (Sistem Hukum), *Electoral System* (Sistem Pemilu), dan *Party system* (sistem kepartaian).

1. *Legal System* (Sistem Hukum) Aturan dan peraturan yang mengatur proses politik, pemilu, serta hak dan kewajiban individu sangat penting dalam sistem politik. Hukum dasar mengatur partisipasi politik, seleksi kandidat, dan mekanisme pemilu, serta menjamin keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Sistem hukum memastikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan setara untuk bersaing dalam proses politik dan legislatif.
2. *Electoral System* (Sistem Pemilu) Menurut Pippa Norris, sistem pemilu adalah struktur dan prosedur yang mengatur cara suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi legislatif. Sistem ini

mempengaruhi representasi politik dan dapat berupa sistem proporsional, mayoritas, atau kombinasi keduanya. Sistem pemilu berfungsi untuk membuka atau membatasi peluang bagi individu dan partai untuk memenangkan kursi di badan legislatif.

3. *Party system* (Sistem Kepartaian)
Sistem kepartaian mencakup pola hubungan antara partai-partai politik, jumlah partai yang ada, dan interaksi mereka dalam struktur politik serta pemilu. Sistem ini mengatur cara partai berkompetisi untuk mengisi posisi legislatif, memilih kandidat, dan berinteraksi dengan sistem hukum serta pemilu. Selain itu, sistem kepartaian juga berperan penting dalam proses rekrutmen politik, menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri dan bagaimana kandidat tersebut dipilih oleh pemilih.

Secara keseluruhan, Ketiga sistem ini membentuk dasar yang penting untuk menciptakan proses yang adil, transparan, dan inklusif, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi politik dan memastikan representasi yang seimbang dalam legislatif.

B. Faktor Pendorong

Dalam hal ini, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kota Pekanbaru menunjukkan dinamika tertentu dalam mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam pencalonan legislatif. Dalam karya Drude Dahlerup (2014) yang berjudul *Women in Politics: Gender, Power and Development* membagi 2 faktor pendorong yaitu internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
Peningkatan keterwakilan perempuan dalam partai politik bergantung pada kemauan politik (*political will*) dari elit partai, seperti ketua umum dan tokoh-tokoh

senior. Elit partai memiliki kekuasaan untuk menetapkan agenda dan alokasi sumber daya, yang mempengaruhi rekrutmen, pelatihan, dan dukungan terhadap kandidat perempuan. Jika elit partai mendukung partisipasi perempuan, ini akan menciptakan budaya internal yang positif. Namun, tanpa kemauan politik yang kuat, meskipun ada kebijakan kuota eksternal, implementasinya bisa hanya formalitas, dengan partai memenuhi kuota secara minimal tanpa memberikan dukungan yang cukup kepada kandidat perempuan, sehingga keterwakilan perempuan yang substansial sulit tercapai.

2. Faktor Eksternal

Selain kebijakan kuota, gerakan perempuan yang terorganisir berperan penting dalam mendorong keterwakilan perempuan. Bakal calon legislatif perempuan (*bacaleg*) menciptakan tekanan eksternal pada partai dengan menyuarakan aspirasi mereka untuk posisi yang layak, didukung oleh mobilisasi jaringan perempuan dan kelompok sipil. Tekanan ini, termasuk potensi kehilangan suara dan sorotan media, memaksa partai untuk lebih memperhatikan keterwakilan perempuan dalam seleksi dan nominasi.

Menurut Drude Dahlerup, keterwakilan perempuan dalam partai politik dipengaruhi oleh kombinasi komitmen elit partai dan strategi internal, serta kebijakan kuota eksternal sebagai katalis. Kemauan politik pemimpin partai yang menciptakan strategi inklusif akan lebih efektif jika didorong oleh tekanan eksternal seperti kebijakan kuota. Selain itu, tuntutan dari bakal calon legislatif perempuan dan pendukungnya juga berperan sebagai tekanan eksternal. Sinergi antara komitmen internal dan tekanan eksternal inilah yang paling efektif dalam mendorong peningkatan representasi perempuan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berbentuk tulisan, ucapan serta tindakan dan perilaku orang-orang yang diamati. Peneliti menetapkan penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengetahui bagaimana rekrutmen politik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam keterwakilan perempuan di DPRD di Kota Pekanbaru pada tahun 2024. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN A.

Rekrutmen Politik

1. *Legal System* (Sistem Hukum)

Proses rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan seleksi calon legislatif yang transparan, adil, dan berbasis kualitas. Partai Gerindra memastikan bahwa setiap calon legislatif memiliki rekam jejak baik, integritas, kompetensi, dan komitmen memperjuangkan hak-hak perempuan. Rekrutmen dilakukan berdasarkan AD/ART dan hukum yang berlaku, untuk menjamin proses yang objektif dan inklusif. Dalam AD/ART Gerindra, syarat keanggotaan mencakup kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, usia minimal 17 tahun atau telah menikah, kepatuhan terhadap aturan partai, serta pernyataan resmi untuk bergabung. Syarat ini

mencerminkan komitmen partai terhadap nilai dasar dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Berdasarkan data kepengurusan tahun 2024, DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru terdiri dari 23 pengurus, dengan 8 di antaranya perempuan (34,78%), sesuai dengan Keputusan Nomor 07-0260/Kpts/DPP-GERINDRA/2022.

Sementara itu, pada tingkat kecamatan terdapat 53 pengurus dengan 19 perempuan (35,85%) yang tersebar di 15 kecamatan. Data ini mencerminkan komitmen Gerindra dalam mendorong partisipasi politik perempuan serta upaya mewujudkan keseimbangan gender dalam struktur kepengurusan partai di tingkat kota dan kecamatan.

Keterlibatan aktif kader perempuan dalam struktur Partai Gerindra menjadi modal strategis untuk meningkatkan perolehan suara perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai menunjukkan peran signifikan yang dapat dijadikan contoh dalam menarik dukungan pemilih perempuan. Melalui strategi penguatan peran perempuan dalam kampanye dan pemberdayaan kader di daerah pemilihan, Partai Gerindra berupaya tidak hanya meningkatkan suara, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dalam politik.

Dalam upaya menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilu 2024, DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru menjalankan proses seleksi yang ketat dan berlandaskan AD/ART partai serta ketentuan hukum yang berlaku. Setiap bakal calon legislatif diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, termasuk dokumen identitas, surat keterangan bebas pidana dan narkoba, ijazah yang dilegalisir, serta

KTA Partai. Seluruh dokumen harus diserahkan dalam format digital dan hardcopy rangkap dua. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan integritas, kapabilitas, dan kepatuhan hukum calon, sehingga menghasilkan kandidat legislatif yang berkualitas dan kredibel.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru mencalonkan 48 orang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2024, terdiri dari 19 perempuan dan 29 laki-laki, dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 39,58%. Angka ini menunjukkan bahwa Gerindra tidak hanya memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan, tetapi juga melampauinya.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen partai dalam mendorong partisipasi politik perempuan dan membangun representasi yang lebih inklusif. Sebaran calon perempuan di seluruh dapil menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar pemenuhan syarat, melainkan bagian dari strategi untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan merata.

Meski Partai Gerindra tidak memberikan afirmasi khusus untuk calon perempuan dalam proses pendaftaran bacaleg dan menggunakan mekanisme seleksi netral gender, pendekatan ini hanya menjamin kesetaraan formil. Hambatan struktural seperti keterbatasan akses sumber daya, jaringan, dan beban sosialkultural masih menjadi tantangan bagi perempuan dalam politik.

Oleh karena itu, selain memenuhi kuota numerik, diperlukan strategi lanjutan seperti pelatihan kepemimpinan, penempatan nomor urut strategis, dan penguatan kapasitas kader perempuan agar keterlibatan mereka bersifat substantif dan berpengaruh nyata dalam pengambilan keputusan politik.

2. *Electoral System* (Sistem Pemilu)

Electoral system merupakan komponen penting dalam strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Pekanbaru untuk Pemilu 2024. Dengan komitmen memperkuat peran kader laki-laki dan perempuan, pengelolaan basis data yang efisien menjadi kunci dalam menyusun strategi kampanye tepat sasaran. Sistem ini membuka sekaligus membatasi peluang bacaleg memenangkan kursi legislatif. Dengan data terstruktur, Gerindra Kota Pekanbaru dapat memetakan kekuatan dan potensi dukungan di setiap dapil, sehingga peluang kemenangan calon dapat dioptimalkan.

Dalam Pemilu 2024, pembagian daerah pemilihan calon legislatif Partai Gerindra Kota Pekanbaru didasarkan bukan hanya geografis, tetapi juga analisis data pemilih dan demografi. Data ini menjadi dasar strategi kampanye, pengelolaan sumber daya, serta distribusi materi kampanye sesuai karakteristik pemilih tiap wilayah. Dengan dukungan basis data yang kuat, DPC Gerindra Kota Pekanbaru siap menghadapi Pemilu 2024 secara terarah, memastikan setiap calon mendapat dukungan maksimal dan membawa kemenangan di semua dapil. Pada Pemilu 2024, Kota Pekanbaru terbagi menjadi tujuh Daerah Pemilihan dengan total populasi 1.085.276 jiwa dan 50 kursi DPRD. Partai Gerindra berperan penting dengan menempatkan calon legislatif terbaik di tiap dapil untuk memastikan representasi maksimal. Gerindra Kota Pekanbaru berkomitmen memilih calon yang kompeten dan dekat dengan masyarakat agar mampu mewakili aspirasi pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

DPC Partai Gerindra Kota

Pekanbaru mengelola basis data secara cermat untuk memastikan keterwakilan perempuan di setiap Dapil, dengan mempertimbangkan kesesuaian tempat tinggal calon. Misalnya, Dapil 1 memiliki calon perempuan dari Sukajadi, Marpoyan Damai, dan Binawidya, serta Dapil 2 dari Tuah Madani, Rumbai, dan Rumbai Pesisir. Dapil 3 didominasi calon perempuan dari Tenayan Raya, sementara Dapil 4, 5, dan 6 juga menunjukkan keterwakilan perempuan dari berbagai kecamatan di wilayahnya. Upaya ini bertujuan menciptakan pemerataan dan representasi perempuan yang adil di seluruh dapil sesuai strategi pemilu.

Pemilihan umum adalah tahap akhir rekrutmen politik, di mana kandidat perempuan dapat dipilih langsung oleh pemilih untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Pekanbaru, Partai Gerindra berhasil meraih 7 kursi di setiap Dapil. Keberhasilan ini menunjukkan soliditas dan strategi efektif partai dalam meraih dukungan masyarakat di seluruh wilayah. Dengan perolehan kursi yang merata, Partai Gerindra memperkuat posisinya untuk mewakili aspirasi rakyat di pemerintahan.

Partai Gerindra berhasil memperoleh tujuh kursi DPRD Kota Pekanbaru, namun hanya satu kursi diduduki oleh perempuan. Meski keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap mencapai 39,58%, representasi perempuan dalam kursi legislatif belum maksimal. Hal ini menjadi tantangan bagi partai untuk meningkatkan keterwakilan perempuan demi kesetaraan gender yang lebih nyata di pemilu mendatang.

Ibu Sri Rubiyanti, perempuan terpilih DPRD Pekanbaru dari Partai Gerindra, menyampaikan bahwa meski sudah dua

kali menjabat, ia menghadapi tantangan di Dapil baru yang kurang dikenal. Dengan dukungan tim sukses yang solid, Sri aktif turun lapangan, mengenal masyarakat, dan menyusun strategi untuk meraih kepercayaan serta memberikan kontribusi maksimal.

Sementara itu, Bapak Ervan, Sekretaris DPC Gerindra Pekanbaru, menjelaskan bahwa partai mengadakan pelatihan Bacaleg sesuai AD/ART, yang difokuskan untuk mempersiapkan kader menjadi calon legislatif dan pemimpin di berbagai tingkat. Pelatihan ini bertujuan agar Bacaleg siap bekerja mewakili masyarakat dan partai secara optimal.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tantangan calon legislatif dapat diatasi berkat persiapan matang melalui pelatihan yang sistematis dan dukungan tim sukses yang kuat, sehingga diharapkan Bacaleg dapat memberikan kontribusi positif di DPRD Kota Pekanbaru.

Meski Partai Gerindra telah memberikan bekal dan dukungan, penyesuaian dengan kebutuhan lokal, komunikasi langsung, dan membangun kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan perolehan suara. Oleh karena itu, strategi matang dan pendekatan tepat sangat penting bagi setiap calon legislatif untuk meraih hasil maksimal pada Pemilu mendatang.

3. *Party System* (Sistem Kepartaian)

DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru menerapkan sistem kepartaian yang demokratis dan terbuka dalam rekrutmen calon legislatif. Proses seleksi melibatkan berbagai tingkatan organisasi partai, dari ranting hingga pusat, menunjukkan sistem partisipatif dan terdesentralisasi yang memberi kesempatan

lebih luas bagi kader dalam menentukan calon legislatif yang diusung. Partai Gerindra menerapkan seleksi terbuka dengan kriteria jelas dan objektif. Kandidat yang maju harus memiliki rekam jejak baik, integritas, dan kemampuan mewakili kepentingan masyarakat. Proses ini memastikan calon legislatif berkualitas dan berkomitmen, sekaligus memberikan peluang setara bagi perempuan, menegaskan komitmen partai pada kesetaraan gender.

Komitmen Partai Gerindra terhadap keterwakilan perempuan terbukti dari struktur kepengurusan DPC Kota Pekanbaru tahun 2024, dengan 34,78% perempuan di tingkat cabang dan 35,85% di tingkat kecamatan. Partai ini tidak hanya memenuhi kuota sesuai Undang-Undang Pemilu, tetapi juga aktif mendorong partisipasi perempuan, menciptakan platform inklusif bagi perempuan untuk berkompetisi dan berkontribusi dalam politik.

Penerapan sistem kepartaian terdesentralisasi di Partai Gerindra memungkinkan pengambilan keputusan calon legislatif melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari ranting hingga pusat. Hal ini mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat, memastikan proses seleksi yang inklusif, adil, dan representatif sesuai aspirasi lokal. Keterlibatan banyak elemen meningkatkan transparansi dan memperkuat demokrasi internal partai. Penerapan demokrasi internal dalam seleksi calon legislatif di Partai Gerindra memberikan peran aktif kepada anggota partai dalam menentukan kandidat. Dengan mengutamakan rekam jejak dan kemampuan, partai memastikan calon yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu mewakili kepentingan masyarakat secara optimal,

sehingga menciptakan representasi yang adil dan beragam.

Proses seleksi yang terbuka, adil, dan transparan di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan peluang luas bagi perempuan untuk berkompetisi, menegaskan komitmen partai dalam mendorong kesetaraan gender di dunia politik. Namun, tantangan untuk mencapai representasi perempuan yang lebih signifikan masih ada. Hal ini terlihat dari hasil Pemilu Legislatif 2024, di mana meskipun perempuan mencapai 39,58% dalam Daftar Calon Tetap (DCT), hanya satu perempuan yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif belum sepenuhnya mencerminkan proporsi yang ideal.

Ibu Novia Jimla S.Kom, Bacaleg dari Dapil 3 yang belum terpilih, mengungkapkan pengalamannya saat pemilu. Ia fokus membantu masyarakat dengan mengurus dokumen dan mendapatkan suara terbanyak kedua di dapil tersebut. Meski belum berhasil menang, ia tetap optimis dan berencana mencalonkan diri lagi.

Wawancara ini menunjukkan bahwa selain proses seleksi internal yang transparan dan demokratis dari Partai Gerindra, keberhasilan di lapangan sangat dipengaruhi oleh strategi kampanye, karakteristik pemilih, dan dinamika politik lokal. Calon legislatif harus mampu membangun komunikasi yang kuat dan memahami kebutuhan masyarakat agar mendapat dukungan maksimal. Jadi, seleksi internal hanyalah awal; tantangan sesungguhnya ada saat berhadapan langsung dengan pemilih.

Sistem kepartaian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024 menunjukkan model yang partisipatif, desentralistik, dan relatif terbuka dalam proses seleksi kandidat. Pendekatan ini menjadi landasan penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam struktur partai dan pencalonan legislatif. Namun, meskipun representasi perempuan secara formal telah tercapai melalui Daftar Calon Tetap (DCT), realisasi keterwakilan substantif di tingkat elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penguatan sistem kepartaian yang lebih sensitif gender menjadi kebutuhan penting untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi struktural dan pencapaian hasil politik yang setara bagi perempuan.

B. Faktor Pendorong

1. Faktor Internal Kemauan politik elit partai harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader perempuan. Pendidikan ini meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kepercayaan diri perempuan dalam proses politik dan pencalonan legislatif. Dengan pelatihan kepemimpinan, pemahaman sistem pemilu, dan strategi kampanye yang efektif, partai menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan perempuan sebagai kandidat kompeten. Pendidikan politik menjadi indikator utama kemauan politik elit partai, yang mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui alokasi sumber daya khusus.

Pendidikan politik adalah upaya strategis untuk memperkuat struktur, organisasi, dan kapasitas kader partai dalam mencapai tujuan politik. Ini meliputi peningkatan

koordinasi antar pengurus, pelatihan kader, serta pemantapan visi dan misi partai di tingkat lokal dan nasional. Melalui pendidikan politik, partai dapat bergerak lebih terorganisir, solid, dan efektif dalam menjalankan agenda politik, termasuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Kegiatan pendidikan politik ini dirancang agar setiap kader siap berperan aktif dalam perjuangan politik dan mampu berkompetisi secara efektif di berbagai tingkatan, terutama dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan persiapan yang matang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan partai di masa depan. Tabel 3.1 Pendidikan Politik DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru.

Hari / tanggal	Tempat	Kehadiran
Senin, 22 Januari 2024	Jl. Kartama, Marpoyan Damai	Perempuan : 177 orang
		Laki-laki : 123 orang
		Total : 300 orang
Sabtu, 06 Juli 2024	Jl. Singgalang, Tenayan Raya	Perempuan : 114 orang
		Laki-laki : 86 orang
		Total : 200 orang

Sumber : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru.

Tabel di atas menggambarkan dua kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru, yaitu Pendidikan Politik dan Temu Kader, yang berlangsung di dua kecamatan berbeda, yakni Marpoyan

Damai dan Tenayan Raya. Kegiatan tersebut merupakan upaya signifikan dalam memperkuat kader internal partai, dengan fokus pada pemberian pemahaman politik, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan solidaritas dan koordinasi antara pengurus partai di tingkat kecamatan maupun kota Pekanbaru.

Terlihat bahwa pada kegiatan pertama yang diselenggarakan di Kecamatan Marpoyan Damai pada 22 Januari 2024, jumlah kehadiran mencapai 300 orang, dengan 177 di antaranya merupakan perempuan. Kegiatan ini melibatkan Ketua dan Sekretaris Pengurus

Anak Cabang (PAC) Kecamatan Marpoyan Damai, sekaligus memberikan bekal politik yang bertujuan memperkuat kapasitas kader serta meningkatkan peran perempuan dalam dunia politik. Pengeluaran sebesar Rp 15.755.000 mencerminkan komitmen besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan dampak positif yang berkelanjutan bagi kader partai.

Sementara itu, kegiatan kedua yang dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya pada 6 Juli 2024 diikuti oleh 200 peserta, dengan 114 di antaranya adalah perempuan. Kegiatan ini difokuskan untuk memberikan pendidikan politik kepada Anggota DPRD Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Pekanbaru, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas kader pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran sebesar Rp 10.790.000 mencerminkan alokasi sumber daya yang signifikan untuk memastikan kader partai di berbagai tingkatan memperoleh pendidikan politik yang optimal.

Kedua kegiatan tersebut mencerminkan upaya penguatan internal yang dilakukan oleh DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru dengan fokus pada pendidikan politik yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kader Partai Gerindra akan lebih siap dan terampil dalam menghadapi berbagai tantangan politik serta mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam perjuangan partai, termasuk dalam meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, proses persiapan yang teliti ini juga menunjukkan keseriusan partai dalam menciptakan mekanisme yang profesional dan efektif agar setiap kader mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu kader, tetapi juga memperkuat solidaritas dan sinergi di antara pengurus dan anggota partai, sehingga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kapasitas kader secara umum, pendekatan yang lebih spesifik dan terarah untuk pemberdayaan kader perempuan masih kurang optimal. Ketiadaan keterlibatan aktif sayap perempuan partai seperti Perempuan Indonesia Raya (PIRA) dalam kegiatan pendidikan politik tersebut menjadi salah satu bukti bahwa strategi penguatan perempuan belum mendapatkan prioritas penuh. Padahal, peran organisasi sayap perempuan sangat penting untuk menciptakan ruang yang kondusif bagi kader perempuan dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan memperluas jaringan politik mereka. Oleh

karena itu, perlu adanya perbaikan dan pengembangan program yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus kader perempuan agar target representasi gender dalam partai dapat tercapai secara nyata.

Hal ini menunjukkan bahwa kemauan politik (*political will*) dari elit Partai Gerindra terkait peningkatan keterwakilan perempuan belum sepenuhnya diwujudkan dalam langkah-langkah yang konkret dan terarah. Oleh karena itu, meskipun pendidikan politik dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, kurangnya fokus khusus pada penguatan kader perempuan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan representasi politik perempuan dari Partai Gerindra di Kota Pekanbaru.

2. Faktor Eksternal

Menurut Drude Dahlerup, keterwakilan perempuan dalam partai politik dipengaruhi oleh tekanan dari luar dan komitmen dari dalam partai. Salah satu tekanan dari luar adalah tim sukses para calon legislatif perempuan. Tim sukses ini membantu menggalang dukungan masyarakat dan membangun citra positif bagi calon perempuan. Dengan dukungan yang kuat dari tim sukses, partai jadi terdorong memberi posisi lebih baik bagi perempuan. Jadi, keberadaan tim sukses perempuan penting untuk mendorong perubahan dan meningkatkan peran perempuan dalam politik.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024 mengarahkan para calon legislatif yang diusungnya untuk membentuk tim sukses yang solid demi meraih suara terbanyak dan menjadikan Gerindra sebagai pemenang di Kota Pekanbaru. Para calon legislatif diinstruksikan memilih individu yang

memiliki komitmen tinggi, loyalitas, pengaruh, serta kemampuan kerja keras dan tanggung jawab yang kuat. Tujuan utama dari langkah ini adalah agar tim sukses dapat melaksanakan strategi kampanye secara maksimal dan efektif, sehingga meningkatkan peluang kemenangan partai dalam pemilu tersebut.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru menekankan pentingnya memilih anggota tim sukses yang kreatif, produktif, dan disiplin. Kreativitas diperlukan untuk merancang kampanye yang inovatif dan menarik perhatian pemilih, sementara produktivitas menjadi kunci agar setiap kegiatan kampanye dapat berjalan lancar. Disiplin juga sangat dibutuhkan agar tim sukses dapat bekerja secara terorganisir dan fokus dalam mencapai tujuan bersama. Dengan membentuk tim yang solid dan kompeten, Partai Gerindra Kota Pekanbaru berharap dapat meraih kemenangan signifikan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Pekanbaru.

Ibu Hj. Sri Rubiyanti, S.IP, anggota DPRD Kota Pekanbaru 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan. Sejak 2019, beliau fokus pada program ketahanan pangan dengan pelatihan penanaman sayur dan cabe di lahan terbatas menggunakan polybag. Meski kini bertugas di komisi berbeda, semangatnya tetap kuat menggerakkan warga agar mandiri dalam pertanian rumah tangga. Visi beliau tidak hanya legislatif, tapi juga penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Ibu Novia Jimla S.Kom, Bacaleg dapil 3 yang tidak terpilih, aktif mempromosikan diri melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok

(@noviajimla) selama masa pencalonan. Karena tidak memiliki tim sukses formal,

ia mengandalkan sukarelawan dari organisasi dan teman yang mendukung visi misinya. Promosi digital ini menjadi strategi untuk menjangkau pemilih lebih luas dan membangun citra sebagai pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partai Gerindra mengarahkan calon legislatif membentuk tim sukses yang solid guna meningkatkan peran perempuan dalam Pemilu 2024. Dukungan dan penguatan jaringan tim sukses diharapkan membantu calon perempuan meraih suara lebih banyak, sehingga keterwakilan mereka di parlemen meningkat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Dinamika eksternal seperti tim sukses yang terorganisir dan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye mandiri memainkan peran penting dalam membuka ruang partisipasi perempuan di politik. Strategi aktif yang dilakukan oleh figur seperti Hj. Sri Rubiyanti, S.IP dan Novia Jimla, S.Kom memperkuat hubungan dengan pemilih dan menyuarakan aspirasi perempuan secara langsung.

Partai Gerindra Kota Pekanbaru, melihat pendekatan ini tidak hanya meningkatkan elektabilitas kandidat perempuan tetapi juga mendorong partai lebih responsif terhadap keterwakilan gender. Tekanan eksternal melalui kampanye adaptif dan inklusif menjadi faktor kunci dalam peningkatan keterwakilan perempuan dan mencerminkan transformasi politik yang lebih partisipatif dan demokratis.

G. PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota

Pekanbaru tahun 2024, Rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Gerindra Kota Pekanbaru pada Pemilu 2024 telah memenuhi kuota 30 persen sesuai aturan hukum, dengan keterwakilan perempuan mencapai 39,6% dalam DCT. Namun, berdasarkan model rekrutmen Pippa Norris, keterlibatan perempuan belum sepenuhnya substantif. Pada tahap sistem hukum, tidak ada afirmasi khusus dalam seleksi sehingga perempuan bergantung pada mekanisme netral gender. Pada tahap sistem elektoral, strategi data dan pemetaan dapil membantu distribusi kandidat perempuan, tetapi belum menjamin keterpilihan tanpa kampanye yang kontekstual. Pada tahap sistem partai, meski ada peluang partisipasi melalui sistem demokratis dan desentralisasi, kurangnya dukungan afirmatif membuat perempuan menghadapi hambatan struktural. Dengan demikian, keterwakilan perempuan masih berisiko bersifat simbolik dalam Partai Gerindra Kota Pekanbaru.

Keberhasilan Bacaleg dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, menurut Drude Dahlerup. Secara internal, Partai Gerindra telah memberikan pendidikan politik dan temu kader, namun belum fokus khusus pada Bacaleg perempuan. Secara eksternal, tantangan muncul terutama dalam pembentukan tim sukses, di mana kandidat perempuan belum optimal menunjukkan inisiatif dan kemampuan membangun dukungan. Hal ini menyulitkan Partai Gerindra dalam mengukur potensi elektoral perempuan untuk mencapai keterwakilan di DPRD Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai rekrutmen Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra) dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru 2024, penulis menyarankan agar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meningkatkan program pelatihan dan pendidikan politik bagi kader dan bacaleg perempuan. Selain itu, penting untuk ada pembinaan yang memotivasi bacaleg perempuan agar dapat bersaing secara optimal.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga perlu mengevaluasi kinerja bacaleg perempuan selama kampanye dan memberikan bimbingan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi mereka, sehingga pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan tidak hanya formal, tetapi juga berdampak positif bagi kualitas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku dan E-book Al-Hamdi, R. (2022). Kuasa padat modal: strategi elektoral partai dalam sistem liberal. Yogyakarta: Basabasi.
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarti, P. et all. (2021). Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gustina, S. A. (2022). Hak Politik Perempuan di Parlemen: Perspektif Hukum yang Berkeadilan. Indonesia: Feniks Muda Sejahtera.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament. Cambridge University Press.
- Nurhaidah, S. N. (Ed.). (2025). Dinamika dan strategi komunikasi politik. Lombok: CV Al Haramain.
- Prasetyo, T. (2021). Prinsip-Prinsip Hukum dan Penyusunan Daerah Pemilihan: Seri Filsafat Pemilu. (2021). Yogyakarta: Nusamedia.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, Z. (2010). Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran politik Bung Hatta. Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Suryawati, N. (2020). Hak Asasi Politik Perempuan. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Syafie, H. I. K. (2012). Teori dan analisis politik. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Women in Politics: Gender, Power and Development. (2014). Britania Raya: Bloomsbury Publishing.
- B. Jurnal
- Adityasandi, F. (2019). Analisis penurunan perolehan suara partai politik (Skripsi). Semarang.
- Handayani, Aklima. (2024). Proses Rekrutmen Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Calon Legislatif DPRK Kota Banda Aceh). Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kurniasih, Niken Fitri. (2021). Proses Rekrutmen Politik Partai Perindo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Manik, Lilis Sartika (2021). Rekrutmen Dan Keterpilihan Perempuan Partai Demokrat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Dprd Provinsi Jambi. Skripsi, Universitas Jambi.
- Refaldo, Dicky. (2021). Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019 – 2024. Skripsi. Universitas Riau.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan kuesioner. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi

dan Politik, 3(1), 39-47. Sari, R. (2021). Strategi peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 9(2), 99-112.

Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11279-11289.

Tampubolon, S. M. (2021). Rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan Partai Solidaritas Indonesia Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Skripsi, Universitas Riau.

Umagapi, J. L. (2020). Representasi perempuan di parlemen hasil pemilu 2019: Tantangan dan peluang. *Kajian*, 25(1), 1934.

Wazni. (2013). Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan oleh partai politik di Kota Pekanbaru pada pemilu 2009: Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(16), 102-127.

Wildianti, D., & Syahda, A. (2019). Reforms in political parties through the balancing of funding sources. *Bappenas Working Papers*, 2(1), 1-15.

C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

D. Media Online

Badan Pusat Statistik. (2024). Hasil penghitungan suara sah partai politik peserta pemilu legislatif tahun

1955-2024. Badan Pusat Statistik. Diakses dari [www. Badan Pusat Statistik \(BPSStatisticsIndonesia\).com](http://www.bps.go.id)

Open Data KPU. Tersedia online di <https://opendata.kpu.go.id/2024>.

PEKANBARU.GO.ID. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru. Diakses dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/men> u /profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru Gerindra.id. (2008). Profil Partai Gerindra. Diakses dari <https://gerindra.id/profilpartai-gerindra/>.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2025). Kota Pekanbaru. Diakses dari <https://pekanbarukota.bps.go.id/id/publication>.